

Abstrak

Tindak pidana korupsi sudah menjadi kejahatan yang bersifat transnasional. Hal ini karena pada prakteknya, banyak pelaku tindak pidana korupsi yang kemudian menyimpan aset hasil tindak pidana korupsi tersebut di luar negeri. Peristiwa ini terjadi di seluruh dunia termasuk salah satunya di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Indonesia pun tidak luput dari modus kejahatan tersebut. Oleh karena itu, muncul salah satu upaya yang ditawarkan untuk menangani kejahatan ini yaitu upaya Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) melalui instrumen hukum *United Nations Convention Against Corruption 2003*. Selain memberikan efek jera, upaya ini dilaksanakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Namun, proses pelaksanaannya tidak mudah dan belum maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini disusun dengan tujuan untuk menguraikan implementasi pengaturan *Asset Recovery* berdasarkan UNCAC di Indonesia dan menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan Pemulihan Aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian Yuridis Normatif dengan sumber data dari Data Sekunder dan dilengkapi dengan data pendukung yakni Data Primer melalui wawancara dengan Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan penelitian ini, ratifikasi UNCAC di Indonesia melahirkan strategi baru untuk menangani tindak pidana korupsi khususnya yang bersifat transnasional. Tiga strategi utama UNCAC untuk menangani korupsi ditekankan pada upaya Kriminalisasi, Pemulihan Aset, dan Kerja Sama Internasional yang kemudian dituangkan dalam peraturan hukum nasional Indonesia. Pelaksanaan Pemulihan Aset oleh Indonesia atas aset yang berada di luar negeri dilakukan dengan upaya kerja sama *Mutual Legal Assistance* (MLA). Untuk mendukung upaya kerja sama MLA, Indonesia turut aktif membuat perjanjian MLA secara bilateral maupun multilateral dengan negara lain serta menjadi bagian dari komunitas-komunitas internasional untuk menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum dari negara lain dalam proses Pemulihan Aset.

Kata Kunci: Pemulihan Aset, UNCAC, Korupsi, *Mutual Legal Assistance*.

Abstract

Corruption has become a transnational crime. This is because practically the perpetrators of corruption store their assets abroad. This criminal modus occurs all over the world, including the South-East Asian countries. Indonesia was inevitable from this crime mode. Therefore, the legal instrument United Nations Convention Against Corruption 2003 offers an innovation to deal with this type of crime called Asset Recovery. Besides of giving a deterrent effect, the purpose of this method is to recover the State's financial losses. However, the implementation of the Asset Recovery is neither easy nor optimal. Therefore, this study was written in order to describe the implementation of Asset Recovery arrangements based on UNCAC in Indonesia and explaining the efforts made by the Government of Indonesia to implement Asset Recovery. This research was conducted using a Normative Juridical research method with sources from Secondary Data and supported with Primary Data through interviews with the State's Attorney Republic of Indonesia. Based on this research, the ratification of UNCAC in Indonesia provides a new strategy to handle the corruption, especially the transnational one. The three main strategies from UNCAC are emphasized on Criminalization, Asset Recovery, and International Cooperation which are already included in Indonesia's national legal instrument. Indonesia also cooperates through Mutual Legal Assistance (MLA) method to perform the Asset Recovery abroad. In order to support the MLA cooperation, Indonesia actively involves in making MLA agreements, bilaterally and multilaterally, with other States and also being part of international communities to coordinate with the Law Enforcement Officer from other countries.

Keywords: Asset Recovery, UNCAC, Corruption, Mutual Legal Assistance